



Wakil Rakyat Tekankan untuk Masyarakat



SUDUT PANDANG FRAKSI

Perubahan APBD 2026 di Kota Yogyakarta naik **10,79 persen**. APBD menjadi **Rp 2,1 triliun** dari semula **Rp 1,9 triliun**.

Perubahan APBD 2026 Melonjak Rp 205 M

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di Kota Yogyakarta naik signifikan. Pada perubahan tahun ini, APBD menjadi Rp 2,1 triliun dari semula Rp 1,9 triliun. Artinya, terjadi kenaikan mencapai 10,79 persen atau Rp 205,12 miliar selama tiga bulan akhir 2026.

Di balik kenaikan tersebut, para wakil rakyat kompak mewanti-wanti agar anggaran jumbo ini tidak sekadar jadi macan kertas teknokratis. Sorotan paling tajam mengarah pada lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meroket drastis hingga 243,55 persen, mendaki dari Rp 16,05 miliar menjadi Rp 55,13 miliar.

Haryanto dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, APBD

wajib dipacu untuk memperkuat ekonomi akar rumput, mengerem angka kemiskinan, serta meratakan pembangunan.

"APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil," katanya.

Nada serupa diemaskan Krisnadi Setyawan dari Fraksi Gerindra. Ia mendesak pemkot membeberkan alasan di balik meroketnya BTT.

"Peningkatan BTT yang signifikan memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai latar belakangnya, mengingat penggunaannya memerlukan akuntabilitas yang tinggi," kata Krisnadi.

Sementara itu, Fraksi PKS lewat juru bicaranya, Muadz A.A., meminta pemkot berjaga-jaga agar kenaikan anggaran tidak berubah wujud menjadi pemborosan birokrasi.

■ Baca **WAKIL...** Hal II



"APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen keberpihakan kepada rakyat kecil."

Haryanto
Fraksi PDI Perjuangan



"Peningkatan BTT yang signifikan memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai latar belakangnya."

Krisnadi Setyawan
Fraksi Gerindra



"Jangan sampai APBD lebih sibuk membiayai aktivitas pemerintahan daripada menyelesaikan persoalan masyarakat."

Mu'adz A.A.
Fraksi PKS



"Jangan sampai keluarga yang sedang kesulitan kehilangan akses pendidikan dan kesehatan hanya karena terganjal batasan desil DTSEN."

Tri Waluko Widodo
Fraksi PAN



"Kami mendorong digitalisasi 100 persen UMKM binaan dan pelaksanaan Gebyar UMKM 4 kali setahun di setiap kementren."

Yogo Prasetyo Pri Hutomo
Fraksi Golkar



"Kami memohon penjelasan bagaimana pemerintah memastikan rasionalisasi tidak berdampak negatif pada program pelayanan dasar."

Taufiq Setiawan
Fraksi PPP

FOTO: FOTO: DOK. PRIBADI/JOGLO JOGJA

Wakil Rakyat Tekankan untuk Masyarakat

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Belanja Barang dan Jasa meningkat Rp 78,82 miliar atau 8,54 persen. Jangan sampai APBD lebih sibuk membiayai aktivitas pemerintahan daripada menyelesaikan persoalan masyarakat," tegasnya.

Urusan perut dan hak dasar warga turut disuarakan Fraksi PAN. Tri Waluko Widodo mengingatkan agar persoalan administrasi data tidak menjadi batu sandungan bagi warga miskin. "Jangan sampai keluarga yang sedang kesulitan kehilangan akses pendidikan dan kesehatan hanya karena terganjal

batasan desil DTSEN. Perlu ada mekanisme verifikasi faktual di lapangan," ujarnya.

Solusi konkret turut disumbangkan Fraksi Golkar. Yogo Prasetyo Pri Hutomo mengusulkan program jempolan mulai dari subsidi bunga KUR nol persen, menggenjot sentra IKM Ngampilan, hingga digitalisasi penuh UMKM agar masuk e-katalog Pemkot Yogyakarta.

"Kami mendorong digitalisasi 100 persen UMKM binaan dan pelaksanaan Gebyar UMKM 4 kali setahun di setiap kemantren," urai Yogo.

Dari sudut pandang pendapatan, Oleg Yohan dari Fraksi NasDem mengapresiasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah nangkring di atas 50 persen. Kendati demikian, ia memandang perlu ada jurus tancap gas lewat optimalisasi aset dan memburu potensi anyar dari sektor pelat merah pariwisata.

Adapun Taufiq Setiawan dari Fraksi PPP meminta jaminan agar rasionalisasi anggaran tidak mencederai urusan hajat hidup orang banyak. "Kami memohon penjelasan

bagaimana pemerintah memastikan rasionalisasi tidak berdampak negatif pada program pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan," pintanya.

Menanggapi rentetan catatan dari anggota legislatif tersebut, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro memastikan seluruh fraksi satu suara. Perubahan APBD 2026 dipatok wajib mendatangkan manfaat konkret bagi warga, dikawal ketat lewat pengawasan ekstra dan akuntabilitas anggaran yang bersih. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005